

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan tentang hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dan 2) untuk menganalisis dan mengkritisi kaitan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan tentang hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dan 2) Bagaimana kaitan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) bahwa Pengaturan tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi dan ketentuan hukum. Antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, termasuk pengaturan mengenai pembiayaan dan pendanaan. 2). Permasalahan Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut keterkaitannya, yaitu: Mendukung Kemandirian Daerah, Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Program, Pemerataan Pembangunan, Kontrol dan Akuntabilitas, Penguatan Kapasitas Daerah, Secara keseluruhan, hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah salah satu alat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberikan dukungan finansial dan teknis yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan, Hibah, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

The aims of this research are: 1) to analyze and criticize the regulations regarding central government grants to regional governments within the framework of regional autonomy and 2) to analyze and criticize the relationship between grants from central government to regional governments in the implementation of regional autonomy. With this aim, the issues discussed are: 1) How are central government grants to regional governments regulated within the framework of regional autonomy and 2) How are grants from central government to regional governments related to the implementation of regional autonomy. With this problem, the research method used is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the research show: 1) that regulations regarding grants from the central government to regional governments within the framework of regional autonomy in Indonesia are regulated through several regulations and legal provisions. Among other things: Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, namely this Law regulates the principles of regional autonomy, including regulations regarding financing and financing.2). The problem of grants from the central government to regional governments is closely related to the implementation of regional autonomy in Indonesia. The following are the links, namely: Supporting Regional Independence, Flexibility in Program Implementation, Equitable Development, Control and Accountability, Strengthening Regional Capacity. Overall, grants from the central government to regional governments are one of the important tools to support the successful implementation of regional autonomy, by providing support financial and technical requirements needed to achieve equitable and sustainable development throughout Indonesia.

Keywords: *Regulations, Grants, Regional Autonomy.*